



ONLINE ISSN : 2964-9764

Published by Universitas Negeri Padang

Vol. 04 No. 1, 2025

Page 91-104

## Komunikasi dalam Perencanaan Pembangunan: Suatu Kajian Kritis dalam Konteks Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi Publik

Nori Yusri <sup>1</sup>, Yunia Wardi <sup>2</sup> & Susi Evanita <sup>3</sup>

Universitas Negeri Padang <sup>1,2,3</sup>

\*Corresponding author, e-mail: [noriyusri@bunghatta.ac.id](mailto:noriyusri@bunghatta.ac.id)

**Abstract** : This study aims to explore the strategic role of communication in development planning, particularly within the framework of participatory and sustainable environmental policy. Employing a qualitative exploratory approach through literature review, this research analyzes recent studies (2021–2025) from diverse geographical contexts to identify patterns, challenges, and contributions of communication to the effectiveness of development policy. The findings indicate that two-way, deliberative, and context-sensitive communication enhances public participation, strengthens policy legitimacy, and bridges gaps between the state and civil society actors. Nevertheless, barriers such as power imbalances, weak institutional capacity, and social exclusion remain significant obstacles. The study underscores the need for policy communication designs that are not merely procedural but also substantive and transformative. These findings contribute theoretically to the discourse on development communication, while offering practical recommendations for planners, policymakers, and scholars in designing inclusive, responsive, and just communication systems for sustainable development governance.

**Keywords** : development communication, environmental policy, public deliberation



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2021 by author.

### PENDAHULUAN

Dalam era disrupsi iklim dan transformasi sosial-ekologis global saat ini, perencanaan pembangunan tidak dapat lagi dipisahkan dari dimensi komunikasi yang efektif dan partisipatif. Komunikasi bukan hanya alat penyampaian informasi, melainkan jembatan konseptual dan praktis antara perencana, pelaksana, dan penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks ini, komunikasi kebijakan pembangunan dan lingkungan memainkan peran strategis dalam

memastikan bahwa proses perencanaan tidak bersifat *top-down*, melainkan inklusif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal dan tantangan global (Walker, 2025a).

Urgensi penguatan komunikasi dalam perencanaan pembangunan semakin mengemuka dalam berbagai krisis lingkungan seperti perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan krisis air. Berdasarkan laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change Assessment Report 6 (IPCC AR6)* dan studi regional seperti di Humboldt Bay, California, kegagalan komunikasi antar aktor kebijakan merupakan salah satu penyebab utama ketidakefektifan adaptasi lingkungan di tingkat lokal (Orth-Gordinier & Richmond, 2025). Hal ini menunjukkan perlunya reformulasi strategi komunikasi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, masih sedikit kajian yang secara sistematis mengintegrasikan komunikasi pembangunan, kebijakan lingkungan, dan partisipasi publik dalam satu kerangka konseptual yang lintas disiplin dan kontekstual. Oleh karena itu, studi ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dalam bentuk integrasi perspektif komunikasi deliberatif dan transformasional dalam praktik perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

Tren global menunjukkan peningkatan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses kebijakan. Namun, digitalisasi informasi tidak serta-merta menjamin keberhasilan komunikasi pembangunan, terutama ketika terjadi kesenjangan pemahaman antar aktor atau rendahnya kapasitas kelembagaan dalam mengelola komunikasi lintas sektor (Rabbani & Cotton, 2025). Komunikasi dalam pembangunan bukan hanya tentang kecepatan distribusi informasi, tetapi juga tentang kedalaman pemahaman dan keterlibatan.

Salah satu permasalahan mendasar adalah ketimpangan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor non-negara. Dalam kasus pembangunan energi di Tanzania, studi oleh Bungwa et al. (Bungwa et al., 2025) menunjukkan bahwa konflik kebijakan banyak dipicu oleh minimnya mekanisme dialog dan komunikasi dua arah yang transparan antara komunitas lokal dan otoritas perencana. Hal ini menyebabkan resistensi sosial dan melemahnya legitimasi kebijakan lingkungan.

Kompleksitas persoalan komunikasi semakin nyata dalam kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan di kawasan perkotaan. Misalnya, dalam studi *urban forest* di Australia, ditemukan bahwa komunikasi yang gagal memperhitungkan nilai-nilai kultural dan spiritual masyarakat adat dapat memicu marginalisasi dan ketidakadilan ekologis (Esperon-Rodriguez et al., 2025a). Ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan komunikasi yang kontekstual dan interkultural dalam perencanaan pembangunan.

Di sisi lain, komunikasi yang inklusif terbukti memperkuat efektivitas kebijakan. Studi mengenai komunikasi platform *weADAPT* menunjukkan bahwa pemetaan jalur dampak (*impact pathways*) berbasis komunikasi kolaboratif dapat meningkatkan pemanfaatan data iklim dalam perencanaan lokal (Bharwani et al., 2025). Keterlibatan multi-aktor melalui komunikasi interaktif menciptakan peluang inovasi dalam merespons dinamika lingkungan yang terus berubah.

Permasalahan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Di berbagai daerah di Indonesia, seperti proyek reklamasi pesisir, pembangunan infrastruktur strategis, dan eksploitasi sumber daya alam, komunikasi antara

pemerintah, masyarakat adat, LSM lingkungan, dan sektor swasta kerap berlangsung dalam konteks ketimpangan informasi dan kekuasaan. Hal ini menciptakan eksklusi sosial, resistensi komunitas, hingga konflik horizontal yang memperlemah legitimasi dan efektivitas kebijakan.

Selain itu, tantangan komunikasi diperparah oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam memfasilitasi dialog lintas sektor, serta oleh kesenjangan literasi digital dan akses informasi di wilayah terpencil. Meskipun teknologi informasi telah berkembang, belum semua aktor pembangunan mampu menggunakan kanal digital secara setara, menciptakan jurang eksklusi baru dalam proses komunikasi pembangunan.

Sayangnya, kajian akademik di Indonesia masih terbatas dalam mengkaji integrasi antara teori komunikasi pembangunan, kebijakan lingkungan, dan praktik partisipasi publik secara interdisipliner dan kontekstual. Mayoritas studi terfokus pada aspek teknis perencanaan atau analisis kebijakan, tanpa menggali secara mendalam dinamika komunikasi antar aktor dan implikasi kekuasaan di dalamnya.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik komunikasi kebijakan pembangunan. Banyak literatur menyoroti bahwa proses komunikasi masih bersifat simbolik dan prosedural, bukan substantif. Hal ini diperparah oleh kurangnya integrasi antara ilmu komunikasi dengan ilmu kebijakan dan perencanaan lingkungan dalam kurikulum pendidikan tinggi dan pelatihan kelembagaan (Murmura et al., 2025). Bagi mahasiswa program doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan, pemahaman mendalam terhadap teori, strategi, serta tantangan komunikasi dalam kebijakan pembangunan merupakan fondasi penting dalam membangun solusi lintas sektor. Kajian ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas sistem sosial-ekologis dan kebutuhan akan kepemimpinan intelektual dalam transformasi kebijakan.

Oleh karena itu, studi ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji peran strategis komunikasi dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan kritis dan reflektif. Fokus utama diarahkan pada bagaimana komunikasi yang deliberatif, inklusif, dan berbasis konteks dapat memperkuat efektivitas kebijakan lingkungan serta memperluas partisipasi publik secara bermakna. Dengan menggabungkan perspektif global dan pembelajaran kontekstual dari Indonesia, kajian ini diharapkan dapat memperluas horizon teoritis sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan, perencana, dan akademisi dalam membangun sistem komunikasi pembangunan yang adil, adaptif, dan berkelanjutan.

Secara teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memperluas horizon kajian komunikasi kebijakan pembangunan melalui integrasi perspektif interdisipliner. Secara praktis, Penelitian ini menyoroti perumus kebijakan, akademisi, dan aktor pembangunan agar mampu mengembangkan strategi komunikasi yang kolaboratif, sensitif terhadap konteks lokal, dan berbasis bukti dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

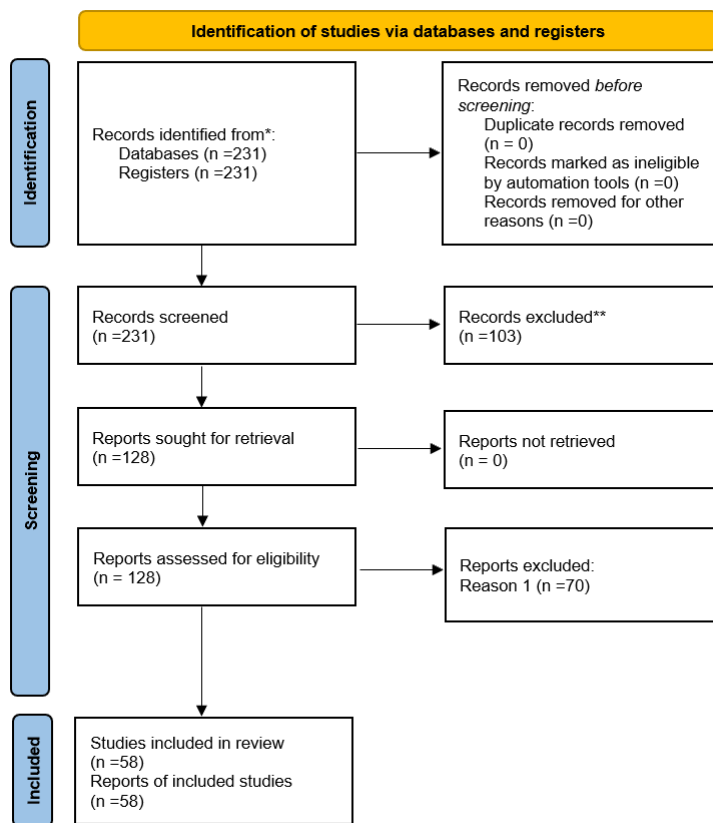
## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi literatur eksploratif untuk menyelidiki dinamika komunikasi dalam perencanaan pembangunan. Jenis Penelitian ini dipilih untuk menggali secara mendalam relasi antara komunikasi, perencanaan pembangunan, dan kebijakan lingkungan melalui pemaknaan terhadap narasi, argumen, serta konteks sosial dari sumber-sumber ilmiah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan dinamika sosial-politik pembangunan secara reflektif dan tidak terbatas pada data kuantitatif. Studi kualitatif pustaka telah direkomendasikan dalam berbagai kajian terbaru sebagai pendekatan yang cocok untuk isu-isu kebijakan dan tata kelola lingkungan yang kompleks (Frost, 2022).

Sumber data dalam Penelitian ini berasal dari literatur sekunder berupa Penelitian jurnal terindeks Scopus dan WoS, buku akademik, dokumen kebijakan, laporan lembaga internasional, serta publikasi terbuka yang membahas tema komunikasi pembangunan, partisipasi, dan lingkungan. Pemilihan sumber didasarkan pada kriteria inklusi berupa: tahun terbit 2021–2025, kesesuaian tema, serta reputasi penerbit (Sage, Springer, Taylor & Francis, Elsevier). Untuk menjaga keberagaman, peneliti juga mempertimbangkan publikasi dari Global South sebagai representasi konteks non-Barat (Trisos, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan dokumentasi dan pencarian sistematis. Database utama yang digunakan meliputi ScienceDirect, SpringerLink, JSTOR, Scopus, dan Google Scholar. Kata kunci pencarian meliputi: *“communication in development planning,” “environmental governance communication,” “participatory environmental policy,”* dan *“qualitative review in sustainability studies.”* Setiap hasil diseleksi menggunakan proses screening berbasis abstrak, teks penuh, dan relevansi tematik. Referensi diklasifikasikan berdasarkan kategori teoritis, konseptual, dan empiris.

Proses seleksi sumber mengikuti alur sistematis berdasarkan model PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Peneliti melakukan proses identifikasi awal dari 231 dokumen, kemudian disaring berdasarkan tahun publikasi, tema, dan aksesibilitas. Setelah tahap screening dan penilaian penuh (full-text assessment), sebanyak 58 dokumen dipilih untuk dianalisis secara mendalam. Prosedur ini memastikan transparansi dan replikasi dalam proses seleksi literatur.



**Gambar 1. Alur Seleksi Literatur Berdasarkan Model PRISMA.**

Sumber: Data diolah 2025

Proses analisis data menggunakan pendekatan analisis isi tematik (*thematic content analysis*). Setiap literatur dikoding menggunakan teknik *open coding* untuk mengekstraksi tema utama, subtema, dan relasi antar konsep. Hasil coding kemudian diklasifikasikan ke dalam matriks tematik yang menggambarkan pola-pola komunikasi dalam konteks pembangunan dan lingkungan. Analisis dilakukan secara manual serta dibantu dengan Zotero untuk pengelolaan referensi dan pencatatan analisis (Braun, & Clarke, 2022).

Karena Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia secara langsung, maka sampel yang digunakan adalah dokumen ilmiah dan kebijakan. Untuk kasus-kasus kontekstual seperti komunikasi pembangunan di kawasan pesisir atau proyek partisipatif lingkungan, peneliti memilih dokumen yang memenuhi kriteria: memuat proses komunikasi antar aktor, mencantumkan konflik atau negosiasi kebijakan, dan mendokumentasikan pendekatan berbasis komunitas (Chen et al., 2023).

Dari sisi pendekatan, metode ini berpijak pada kerangka interpretatif dan kritis. Pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami makna yang dibentuk dalam wacana kebijakan, sedangkan pendekatan kritis digunakan untuk membedah relasi kuasa dan dominasi aktor dalam narasi pembangunan. Kombinasi dua perspektif ini memberikan kedalaman

pemahaman serta mendorong transformasi teoretis dalam kajian komunikasi kebijakan (Toomey, 2023).

### **Penerapan Triangulasi Sumber dalam Penelitian Ini**

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber diterapkan untuk meningkatkan validitas temuan melalui perbandingan informasi dari berbagai jenis dan asal sumber literatur. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan:

1. Jenis Sumber yang Beragam: Penelitian ini tidak hanya mengandalkan artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus dan WoS, tetapi juga mencakup dokumen kebijakan internasional (misalnya laporan IPCC), buku akademik, serta publikasi institusi global seperti UNDP, UNEP, dan World Bank. Ini bertujuan memastikan bahwa informasi yang digunakan tidak bersifat tunggal atau bias disipliner.
2. Representasi Geografis Global dan Kontekstual Lokal: Peneliti secara sadar memilih studi dari berbagai kawasan dunia, termasuk negara maju (Global North) dan berkembang (Global South), untuk menangkap keragaman praktik komunikasi pembangunan dan perencanaan lingkungan. Dalam konteks lokal, data dari Indonesia juga dimasukkan untuk menjembatani generalisasi global dengan realitas nasional.
3. Spektrum Perspektif Teoritis dan Praktis: Triangulasi dilakukan pula melalui integrasi perspektif akademik (dari jurnal ilmiah dan buku teori), perspektif kebijakan (dari laporan lembaga), dan perspektif komunitas (dari studi kasus berbasis partisipasi masyarakat). Hal ini memungkinkan interpretasi yang lebih utuh atas dinamika komunikasi dalam perencanaan pembangunan.
4. Periode Waktu Terbatas dan Terfokus (2021–2025): Dengan menetapkan rentang tahun publikasi yang relatif sempit, penelitian ini memastikan relevansi dan keterkinian informasi yang dianalisis, serta menghindari ketidaksesuaian konteks akibat perkembangan wacana kebijakan yang cepat berubah.

Melalui pendekatan triangulasi ini, sintesis tematik yang dihasilkan menjadi lebih kuat secara metodologis karena memperhitungkan keragaman sumber, konteks, dan pendekatan analisis. Hal ini juga membantu peneliti menghindari bias tunggal dan meningkatkan kredibilitas dalam merumuskan strategi komunikasi pembangunan yang kontekstual, adaptif, dan inklusif.

Untuk menjamin validitas dan keandalan, Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teori. Data dari berbagai disiplin seperti komunikasi lingkungan, studi pembangunan, dan perencanaan wilayah digunakan untuk memperkuat sintesis tematik. Selain itu, peneliti juga membandingkan hasil analisis dengan teori-teori kontemporer seperti Environmental Policy Integration (EPI), komunikasi risiko, dan model komunikasi deliberatif (Hestres, L. E., Boulianne, S., & Wells, 2021).

Etika Penelitian dipatuhi dengan tidak mengubah konteks kutipan, mencantumkan sumber secara eksplisit, dan tidak mengklaim data primer. Penelitian ini sepenuhnya mematuhi kode etik publikasi sekunder sesuai pedoman *Committee on Publication Ethics (COPE)*. Selain itu, referensi yang digunakan dapat diakses publik (*open access*) atau diperoleh melalui akses perpustakaan universitas.

Secara metodologis, pendekatan ini dinilai efektif untuk menjawab pertanyaan Penelitian mengenai bagaimana pola dan fungsi komunikasi memengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun berbasis literatur, hasilnya memberikan fondasi konseptual dan praktis untuk merancang strategi komunikasi kebijakan yang partisipatif dan kontekstual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Integrasi Temuan Studi Terdahulu: Landasan Empiris dan Teoretis

Sebelum memasuki pembahasan konseptual, perlu ditegaskan bahwa hasil ini bersumber dari 58 dokumen hasil seleksi sistematis (PRISMA) yang memuat kajian empiris, teori komunikasi, serta praktik kebijakan pembangunan dan lingkungan. Proses pemilahan ini memperkuat akurasi dan keandalan sintesis tematik yang disajikan.

Penelitian ini dibangun menelaah berbagai Penelitian terdahulu untuk memahami pentingnya komunikasi partisipatif dalam konteks perencanaan pembangunan dan kebijakan lingkungan. Sebagian besar Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Kazemi et al., (2024) dan Goodarzi (2024), menekankan nilai strategis dari pendekatan partisipatif untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Penelitian ini memperluas cakupan diskusi dengan tidak hanya menekankan pada keberadaan partisipasi, tetapi juga mendalami kualitas komunikasi yang terjadi dalam proses tersebut—baik dalam bentuk komunikasi horizontal antarwarga, maupun vertikal antara masyarakat dan pemerintah.

Berbeda dari Penelitian Irawan et al., (2025) yang fokus pada pengelolaan risiko banjir melalui strategi teknis dan partisipatif, Penelitian ini memberikan penekanan kuat pada aspek komunikasi sebagai medium pembentukan pemahaman bersama (*shared meaning*) dan konsensus kebijakan. Dengan demikian, Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang lebih menonjolkan fungsi komunikasi sebagai alat deliberatif, bukan sekadar alat penyampaian informasi.

Penelitian Sornpaisarn et al., (2024) dan Murmura et al., (2025) telah menunjukkan efektivitas komunikasi antar-sektor dalam mendorong kebijakan kolaboratif di bidang kesehatan dan iklim. Penelitian ini memperluas aplikasinya dalam konteks kebijakan pembangunan berbasis lingkungan, dengan memperhatikan aspek sosial dan budaya lokal. Dengan begitu, pendekatan komunikasi dalam Penelitian ini bersifat lintas sektor dan kontekstual.

Sementara itu, temuan dari Dorahaki & Bahari, (2024) tentang hambatan struktural bagi partisipasi perempuan memberikan inspirasi bagi Penelitian ini untuk lebih kritis melihat siapa yang terlibat dalam proses komunikasi pembangunan, dan siapa yang terpinggirkan. Penelitian ini menambahkan lapisan analisis mengenai inklusivitas dalam komunikasi kebijakan, khususnya dalam ruang-ruang formal seperti musrenbang atau forum konsultasi publik.

Penelitian ini juga melengkapi karya Faraji & Zakhimi, (2025), yang menyoroti apatisme publik akibat minimnya transparansi dalam komunikasi kebijakan. Penelitian ini mengembangkan argumen bahwa komunikasi tidak boleh berhenti pada fase konsultasi, melainkan harus menjamin akuntabilitas dan respon institusional terhadap aspirasi masyarakat.

Dari sisi metodologi, Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi literatur eksploratif sebagaimana digunakan dalam beberapa Penelitian terdahulu (misalnya Kazemi et al., 2024), namun memperluasnya dengan kerangka analisis tematik terhadap konten kebijakan dan dokumen ilmiah secara sistematis. Ini menjadikan Penelitian ini tidak hanya sebagai pengulangan studi terdahulu, tetapi sebagai penguatan dan pengayaan dalam hal kedalaman konseptual.

Secara substantif, Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menggabungkan teori komunikasi pembangunan, komunikasi lingkungan, dan pendekatan deliberatif dalam satu kerangka analisis terpadu. Dengan memadukan temuan dari berbagai konteks (Afrika, Asia, Eropa), Penelitian ini juga menawarkan sintesis lintas wilayah yang berguna bagi pengembangan model komunikasi kebijakan yang lebih adaptif.

Dengan demikian, hubungan antara Penelitian ini dengan Penelitian sebelumnya adalah relasi yang bersifat saling memperkuat: Penelitian sebelumnya menjadi dasar empiris dan konseptual, sementara Penelitian ini memperluas cakupan, memperdalam analisis komunikasi, dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori serta implikasi kebijakan yang lebih tajam dan relevan.

### **Konstruksi Teoritis Komunikasi dalam Pembangunan**

Penelitian ini menegaskan bahwa perencanaan partisipatif merupakan pendekatan strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Melalui kajian literatur dan studi kasus global, ditemukan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menciptakan rasa memiliki, akuntabilitas, dan keberlanjutan program. Hal ini sejalan dengan teori *Communicative Planning* yang menekankan pentingnya dialog dan kesetaraan dalam merancang kebijakan publik. Konteks partisipatif dianggap mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan top-down dan realitas komunitas local (Alemayehu et al., 2012)

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terbukti mampu meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Sebagaimana ditemukan dalam kasus KISIP di Kenya, pelibatan warga dalam peningkatan kawasan kumuh berdampak signifikan terhadap ketepatan alokasi sumber daya dan relevansi solusi terhadap kebutuhan warga (Sebunya & Gichuki, 2024). Dalam konteks ini, komunikasi partisipatif berfungsi sebagai mekanisme yang menyelaraskan prioritas pemerintah dan kepentingan lokal.

Pendekatan partisipatif juga menunjukkan kontribusi penting terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) dan Tujuan 16 (Institusi Inklusif dan Akses Partisipatif). Temuan dalam literatur menyebut bahwa perencanaan yang melibatkan warga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual, karena berbasis pada pengetahuan lokal dan pengalaman sehari-hari masyarakat (Sebunya & Gichuki, 2024).

### **Komunikasi Partisipatif dan Efektivitas Kebijakan**

Salah satu kontribusi utama dari partisipasi adalah peningkatan keadilan sosial dalam pembangunan. Di banyak konteks, masyarakat rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas adat sering kali terpinggirkan dalam proses perencanaan formal. Perencanaan partisipatif membuka ruang bagi kelompok ini untuk menyuarakan kebutuhan dan perspektif mereka, sehingga proses pembangunan menjadi lebih setara dan adil (Trisos, 2021).

Namun, efektivitas pendekatan ini tidak bebas dari tantangan. Ketimpangan kekuasaan dan dominasi elit lokal masih menjadi hambatan serius dalam implementasi partisipasi yang setara. Sebagaimana dikritik oleh Sebunya & Gichuki, (2024), partisipasi bisa menjadi semu jika hanya dimanfaatkan sebagai simbol keterlibatan tanpa pengaruh nyata terhadap hasil kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan fasilitasi yang adil dan mekanisme kontrol sosial dalam forum partisipatif.

### **Tantangan Struktural dalam Komunikasi Pembangunan**

Studi literatur juga menemukan bahwa pendekatan ini lebih berhasil jika didukung oleh kapasitas kelembagaan yang kuat. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat (Portland) memiliki sistem partisipatif yang terinstitusionalisasi, sementara di negara berkembang, peran fasilitator lokal, LSM, atau tokoh masyarakat menjadi sangat krusial dalam mendorong keterlibatan aktif (Cilliers, 2019).

Dalam praktiknya, pendekatan partisipatif juga menghadapi kendala teknis seperti waktu, biaya, dan literasi informasi. Komunikasi partisipatif memerlukan investasi dalam pelatihan, forum musyawarah, dan dokumentasi proses yang memadai. Ketidaksiapan infrastruktur komunikasi, terutama di daerah terpencil, bisa menghambat inklusivitas proses (Cooke, 2001).

Tantangan lain adalah kecenderungan masyarakat untuk memilih solusi jangka pendek. Dalam beberapa kasus, partisipasi menghasilkan keputusan yang populer namun tidak selaras dengan prinsip keberlanjutan jangka panjang, seperti eksploitasi sumber daya secara berlebihan demi manfaat ekonomi cepat (Fainstein, 2000). Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan kritis dalam forum partisipatif agar warga memahami implikasi jangka panjang dari kebijakan. Meski demikian, partisipasi masyarakat tetap menjadi fondasi dari tata kelola yang baik. Dalam konteks perubahan iklim dan pembangunan berketahanan, partisipasi berbasis komunitas memberikan peluang untuk membangun solusi adaptif yang sesuai dengan karakteristik sosial-ekologis lokal. Pengetahuan lokal menjadi sumber inovasi dalam menghadapi tantangan lingkungan global.

Teori *Communicative Action* dari Habermas menjadi dasar normatif pendekatan ini, di mana dialog bebas dari dominasi menjadi sarana mencapai konsensus rasional. Dalam perencanaan pembangunan, pendekatan ini menekankan bahwa perencana bukanlah ahli tunggal, tetapi fasilitator yang menghubungkan berbagai perspektif dalam ruang deliberatif (Sebunya & Gichuki, 2024).

Di Indonesia, praktik Musrenbang desa dapat menjadi representasi lokal dari model perencanaan partisipatif. Ketika forum ini difasilitasi secara adil dan komunikatif, warga desa dapat mengidentifikasi kebutuhan, menyusun prioritas, dan memantau pelaksanaan program. Studi Sulaiman et al., (2024) menunjukkan bahwa partisipasi yang aktif dalam Musrenbang

meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Namun demikian, partisipasi bisa menjadi kontraproduktif jika tidak ditopang dengan sistem umpan balik. Jika aspirasi warga tidak diakomodasi secara transparan, maka partisipasi justru akan menimbulkan apatisisme atau konflik. Maka dari itu, partisipasi perlu dikaitkan dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas dan pengawasan warga terhadap realisasi keputusan.

### **Peran Digitalisasi dan Kesenjangan Akses**

Peran teknologi digital juga mulai mengambil bagian dalam perencanaan partisipatif. Aplikasi partisipasi daring, peta digital kolaboratif (*participatory GIS*), dan forum diskusi online telah digunakan untuk memperluas akses warga terhadap ruang-ruang perencanaan, terutama pasca-pandemi. Namun, kesenjangan digital tetap menjadi hambatan inklusi (Kamols et al., 2021). Temuan juga menunjukkan bahwa keberhasilan partisipatif sangat bergantung pada kejelasan peran dan otoritas aktor lokal. Sistem seperti Panchayati Raj di India menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan kualitas perencanaan lokal jika didukung dengan kewenangan dan anggaran yang cukup (Bardhan, 2006).

### **Kontekstualisasi dalam Perencanaan Partisipatif di Indonesia**

Analisis menunjukkan bahwa faktor kontekstual seperti budaya lokal, relasi kekuasaan, serta sejarah konflik sangat mempengaruhi dinamika komunikasi dalam forum partisipatif. Oleh karena itu, pendekatan “satu model untuk semua” tidak bisa digunakan. Perencanaan partisipatif harus dirancang secara fleksibel sesuai karakter wilayah. Kontribusi Penelitian ini secara teoretis adalah memperluas pemahaman tentang komunikasi kebijakan dengan menekankan pentingnya inklusi, dialog, dan legitimasi sosial. Temuan ini memperkaya kerangka teoritis komunikasi pembangunan dan perencanaan tata ruang berkelanjutan dengan elemen komunikasi transformasional.

Perencanaan partisipatif di Indonesia berkembang dalam lanskap kebijakan yang kompleks, diwarnai oleh desentralisasi administratif pasca-reformasi dan keberagaman sosial-budaya antarwilayah. Meskipun kebijakan nasional seperti UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pelaksanaan Musrenbang secara formal memberikan ruang partisipasi publik, realisasi praktik di lapangan masih sangat variatif. Dalam banyak kasus, proses partisipatif belum mampu menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat sipil karena minimnya mekanisme umpan balik, dominasi aktor elit lokal, dan tidak meratanya kapasitas fasilitator. Misalnya, studi oleh Sulaiman et al., (2024) menunjukkan bahwa dalam konteks pengembangan desa agrowisata, efektivitas Musrenbang sangat tergantung pada kemampuan fasilitator dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam bahasa teknokratik yang dimengerti oleh pemangku kepentingan kebijakan. Selain itu, partisipasi masyarakat adat dan kelompok marjinal masih terbatas karena forum perencanaan sering tidak mempertimbangkan nilai-nilai kultural dan hak atas ruang hidup mereka (Esperon-Rodriguez et al., 2025) Dalam konteks inilah, perencanaan partisipatif perlu disesuaikan dengan kondisi sosial-ekologis setempat agar tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi juga ruang deliberatif yang bermakna. Oleh karena itu, kontekstualisasi menjadi kunci dalam memastikan bahwa bentuk, metode, dan substansi partisipasi benar-benar relevan dan inklusif di tingkat tapak.

Pelajaran dari beberapa proyek pembangunan desa berbasis komunitas di NTB dan Sulawesi Tengah, sebagaimana direkam dalam laporan UNDP Indonesia, (2022), juga menekankan pentingnya adaptasi lokal dalam merancang forum partisipatif yang menghargai praktik informal dan pengetahuan lokal sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Lebih jauh, tantangan komunikasi pembangunan dalam konteks Indonesia tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga struktural dan historis. Studi oleh Faraji & Zakhimi, (2025) mengungkap bahwa rendahnya transparansi dan kejelasan peran dalam proses komunikasi seringkali menimbulkan apatisme publik dan ketidakpercayaan terhadap institusi perencana. Situasi ini kian kompleks di daerah-daerah dengan sejarah konflik, seperti Papua atau wilayah-wilayah terdampak pemindahan lahan akibat proyek strategis nasional, di mana komunikasi yang tidak kontekstual bisa memperburuk ketegangan sosial. Dalam kasus pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), banyak organisasi masyarakat sipil mengkritik absennya mekanisme komunikasi yang efektif dan representatif sejak tahap perencanaan awal, sehingga muncul narasi eksklusif dalam proyek yang seharusnya menjadi simbol pembangunan berkelanjutan. Seperti dicatat oleh Walker (2025), keberhasilan komunikasi pembangunan sangat bergantung pada desain komunikasi yang mampu mengakomodasi keragaman identitas, nilai lokal, serta dinamika kekuasaan. Di sinilah pentingnya integrasi pendekatan interkultural dan komunikatif dalam sistem perencanaan nasional. Untuk itu, perlu ada reposisi aktor lokal—seperti tokoh adat, perempuan desa, dan pemuda—sebagai subjek aktif dalam perumusan agenda pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Keterlibatan ini harus difasilitasi secara adil dan disertai dengan penguatan kapasitas komunikasi publik, agar aspirasi masyarakat tidak hanya terdengar tetapi juga terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan kebijakan publik secara substansial.

## SIMPULAN

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap bahwa komunikasi merupakan elemen kunci dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, terutama ketika dikaitkan dengan kebijakan lingkungan dan prinsip partisipasi publik. Melalui pendekatan kualitatif eksploratif berbasis studi pustaka, diperoleh pemahaman bahwa keberhasilan perencanaan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh sejauh mana komunikasi antar aktor berlangsung secara terbuka, setara, dan reflektif.

Komunikasi partisipatif tidak hanya berperan sebagai media penyampaian informasi, melainkan sebagai ruang deliberatif yang memungkinkan pembentukan konsensus, pengakuan terhadap pengetahuan lokal, serta distribusi kekuasaan yang lebih adil dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini selaras dengan teori komunikasi simetris dua arah (Grunic) dan pendekatan *communicative planning* (Healey), yang menjadi landasan teoritis Penelitian ini.

Berbagai studi terdahulu memperkuat temuan bahwa komunikasi yang bersifat inklusif dan kontekstual mendorong efektivitas perencanaan pembangunan. Namun, tantangan struktural seperti ketimpangan kekuasaan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan eksklusif sosial masih menjadi hambatan dalam mewujudkan komunikasi yang bermakna. Hal ini

menunjukkan bahwa komunikasi tidak bersifat netral, tetapi terkait erat dengan dinamika kekuasaan, budaya, dan politik kebijakan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan komunikasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh mekanisme partisipatif yang terinstitusionalisasi, transparansi proses, dan kejelasan umpan balik terhadap aspirasi publik. Dalam konteks Indonesia, forum seperti Musrenbang dapat menjadi ruang potensial jika dikelola dengan prinsip-prinsip komunikasi deliberatif dan bukan sekadar prosedural.

Secara keseluruhan, Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari kualitas komunikasi kebijakan. Komunikasi yang efektif, inklusif, dan kontekstual tidak hanya mendorong legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang kompleks.

Dengan menjadikan komunikasi sebagai dimensi strategis dalam proses perencanaan, maka pembangunan tidak lagi bersifat teknokratis dan eksklusif, melainkan menjadi proses kolektif yang memanusiaikan kebijakan dan merepresentasikan keberagaman suara warga negara.

Dari sisi teoritis, Penelitian ini memperluas pemahaman tentang komunikasi dalam pembangunan dengan mengintegrasikan perspektif lingkungan dan keadilan sosial. Sementara dari sisi praktis, temuan Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang strategi komunikasi kebijakan pembangunan yang lebih responsif, adaptif, dan memberdayakan masyarakat secara substansial.

Secara praktis, hasil ini menjadi dasar bagi pemerintah dan pengambil kebijakan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam memfasilitasi partisipasi warga secara bermakna. Perencanaan tidak hanya soal penyusunan program, tetapi juga menciptakan ruang komunikasi yang adil dan transparan. Keterbatasan utama dalam kajian ini adalah sifatnya yang berbasis literatur, sehingga interpretasi hasil sangat bergantung pada kualitas dan bias narasi sumber. Belum ada observasi lapangan atau wawancara langsung yang bisa menangkap dinamika partisipasi secara empirik dan kontekstual.

Oleh karena itu, Penelitian lanjutan disarankan menggunakan metode *mixed methods* yang menggabungkan pendekatan kualitatif (wawancara, FGD) dan kuantitatif (survey persepsi partisipatif). Selain itu, studi lintas budaya dan lintas wilayah sangat penting untuk menguji validitas temuan dalam konteks yang berbeda. Kesimpulannya, perencanaan partisipatif adalah pilar utama dalam membangun kebijakan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berbasis kepercayaan sosial. Komunikasi yang inklusif dan reflektif tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan, tetapi juga membentuk masyarakat yang tangguh, berdaya, dan berdaulat atas proses pembangunan mereka sendiri.

Keterbatasan Penelitian ini terletak pada pendekatan literatur yang tidak melibatkan data lapangan primer. Oleh karena itu, Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan metode campuran (*mixed methods*) guna mengkaji secara empiris dinamika komunikasi partisipatif di berbagai level tata kelola dan dalam konteks sosial-ekologis yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alemayehu, B., Bogale, B., Fentahun, T., & Chanie, M. (2012). Bovine trypanosomosis: A threat to cattle production in Chena district, southwest Ethiopia. *Open Journal of Animal Sciences*, 02(04), 287–291. <https://doi.org/10.4236/ojas.2012.24039>
- Bardhan, P. . & M. D. (2006). *Decentralization and Local Governance in Developing Countries*. MIT Press.
- Bharwani, S., Williamson, K., & Butterfield, R. (2025). Measuring what matters: Building impact pathways to actionable information for the weADAPT platform. *Climate Services*, 38. <https://doi.org/10.1016/j.cliser.2025.100574>
- Braun, & Clarke, V. (2022). Thematic Analysis: A Practical Guide. SAGE Publications. *Environmental Policy and Governance*, 32(1), 21–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/eet.1990>
- Bungwa, Z. S., Yanda, P. Z., & Lyimo, J. (2025). Stakeholders' analysis for supporting sustainable natural gas development in mainland Tanzania: Implications for coastal forest ecosystem management. *Marine Policy*, 178. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2025.106703>
- Chen, L., Wang, C., Zhong, R., Li, Z., Zhao, Z., & Zhou, Z. (2023). Prediction of Main Parameters of Steam in Waste Incinerators Based on BAS-SVM. *Sustainability (Switzerland)* , 15(2). <https://doi.org/10.3390/su15021132>
- Cilliers, E. J. (2019). Reflecting on green infrastructure and spatial planning in Africa: The complexities, perceptions, and way forward. *Sustainability (Switzerland)*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/su11020455>
- Cooke, B. . & K. U. (2001). *articipation: The new tyranny?* Zed Books.
- Dorahaki, A., & Bahari, M. (2024). Examining Women's Perceived Barriers to Participation in the Reyhan Shahr Project: A Case Study of Tehran's District 12. *Quarterly Journal of Urban and Regional Development Planning*, 9(30), 1–48. <https://doi.org/10.22054/urdp.2024.78343.1618>
- Esperon-Rodriguez, M., Bond, J., Esperon Rodriguez, D., Jeffries, P., Van Ermel Scherer, S., & Tjoelker, M. G. (2025). Aboriginal and Torres Strait islander people's perceptions and preferences of urban forests in Australia. *Discover Cities*, 2(1), 35. <https://doi.org/10.1007/s44327-025-00079-x>
- Fainstein, S. (2000). New directions in planning theory. *Urban Affairs Review*, 35(4), 451–478.
- Faraji, S. J., & Zakhimi, N. (2025). 1 of Tehran. *Journal of Sustainable City*, 8(1), 17–35. <https://doi.org/10.22034/jsc.2025.475490.1798>
- Frost, R. . B. D. . & P. M. (2022). Doing qualitative desk research in environmental governance: Challenges and frameworks. *Environmental Policy and Governance*, 32(1), 21–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/eet.1990>
- Goodarzi, M. (2024). Affecting the realization of the learning city in Ahvaz metropolis. *Journal of Sustainable City*, 7(3), 17–38. <https://doi.org/10.22034/jsc.2024.458976.1779>
- Hestres, L. E., Boulianne, S., & Wells, C. (2021). The role of digital media in participatory environmental governance: A systematic literature review. *Environmental Communication*,

15(2), 213–228.

- Indonesia, U. (2022). *Laporan Program Pemberdayaan Desa dan Perencanaan Inklusif*. UNDP Indonesia.
- Irawan, B., Syafrudin, S., & Budihardjo, M. A. (2025). Flood Management Strategies in the Semarang Old Town Site: an Environmental Sustainability Perspective. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 19(2), e011181. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v19n2-020>
- Kazemi, N., Ferdowsi, S., & Roghangirha, P. (2024). Developing a Community-Based Tourism Model in Iran: A Systematic Review and Grounded Theory Research. *Journal of Urban Tourism*, 11(4), 113–134. <https://doi.org/10.22059/jut.2024.376574.1211>
- Murmura, F., Pierli, G., & Bravi, L. (2025). Exploring Environmental Justice and Climate Awareness in Italy: Citizen Perspectives on Sustainability and Policy. In E. Kuzmin, G. M. Hodgson, L. Bravi, & Y. Lavrikova (Eds.), *Searching for Developmental Alternatives in Economic Theory* (pp. 161–172). Springer Nature Switzerland.
- Orth-Gordinier, K., & Richmond, L. (2025). Regional governance solutions for sea-level rise adaptation: Perspectives from Humboldt Bay, California. *Environmental Science and Policy*, 168. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2025.104053>
- Rabbani, M. M. G., & Cotton, M. (2025). The social amplification of risk and climate disaster preparedness: lessons from the Kalapara region in rural Bangladesh. *Environmental Hazards*. <https://doi.org/10.1080/17477891.2025.2492320>
- Sebunya, J., & Gichuki, A. (2024). The Impact of Participatory Planning on Sustainable Development: A Literature Review. In *EdinBurg Peer Reviewed Journals and Books Publishers Journal of Strategic Management* (Vol. 4, Issue 4).
- Sornpaisarn, B., Chunharas, S., Sornpaisarn, S., Saonuam, P., Nipun, R. F., Butryee, C., Samutachak, B., Chandarasorn, M., Supadulya, N., Chunsuttiwat, S., Singha, S., Rojanapithayakorn, W., Ungchusak, K., & Rehm, J. (2024). Enhancing multi-sectoral collaborations for the prevention and control of NCDs in Thailand with a new approach. *Health Research Policy and Systems*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12961-024-01262-z>
- Sulaiman, A. I., Rosyadi, S., Handoko, W., Masrukin, M., Putri, D. D., Wijayanti, I. K. E., & Faozanudin, M. (2024). The Importance of Participatory Communication in Development Planning Deliberations for Agritourism Village Enhancement. *Journal of Intercultural Communication*, 24(1), 144–160. <https://doi.org/10.36923/jicc.v24i1.246>
- Toomey, A. H. . & K. C. (2023). Critical approaches to science communication in sustainability transformations. *Sustainability Science*, 18(1), 99–112.
- Trisos, C. H. . A. J. . & K. M. (2021). Decoloniality and anti-oppressive practices for a more ethical ecology. *Nature Ecology & Evolution*, 5(9), 1205–1212.
- Walker, S. (2025). Rethinking participation: a framework for creative engagement in urban greenspace. *Local Environment*. <https://doi.org/10.1080/13549839.2025.2506596>